



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2019-2020
KE PROVINSI LAMPUNG
20-22 JULI 2020**

*

**

**

*

JAKARTA 2020



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2019-2020
KE PROVINSI LAMPUNG
20-22 JULI 2020**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 ke Provinsi Lampung adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) huruf d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) huruf f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 30 April 2020.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 17 Juni 2020.
4. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor PW/08515/DPR RI/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 perihal Penetapan Daerah Kunjungan Kerja Komisi I s.d. Komisi XI DPR RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 ke Provinsi Lampung adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di bidang pertanian,

lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan dalam rangka melaksanakan salah satu dari tiga fungsi DPR RI, yaitu fungsi pengawasan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 ke Provinsi Lampung adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Lampung;
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Lampung; serta
3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

D. SUSUNAN TIM

Nama Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 ke Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	FRAKSI
1.	SUDIN, S.E.	KETUA TIM/KETUA KOMISI IV/F-PDIP
2.	DANIEL JOHAN, S.E.	WK. KETUA KOMISI IV/ F-PKB
3.	RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.	F-PDIP
4.	MARIA LESTARI, S.Pd.	F-PDIP
5.	YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.	F-PDIP
6.	H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.	F-PG
7.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	F-PG
8.	Ir. ICHSAN FIRDAUS	F-PG
9.	ALIEN MUS, S.H.	F-PG
10.	Ir. H. T. A. KHALID, M.M.	F-GERINDRA
11.	Ir. H. ENDRO HERMONO, M.B.A.	F-GERINDRA

NO.	NAMA	FRAKSI
12.	H. SULAEMAN L. HAMZAH	F-NasDem
13.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.	F-NasDem
14.	H. MUHTAROM, S.Sos.	F-PKB
15.	FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.	F-PKB
16.	Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.	F-PD
17.	MUSLIM, S.H.I., M.M.	F-PD
18.	Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.	F-PKS
19.	H. JOHAN ROSIHAN, S.T.	F-PKS

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

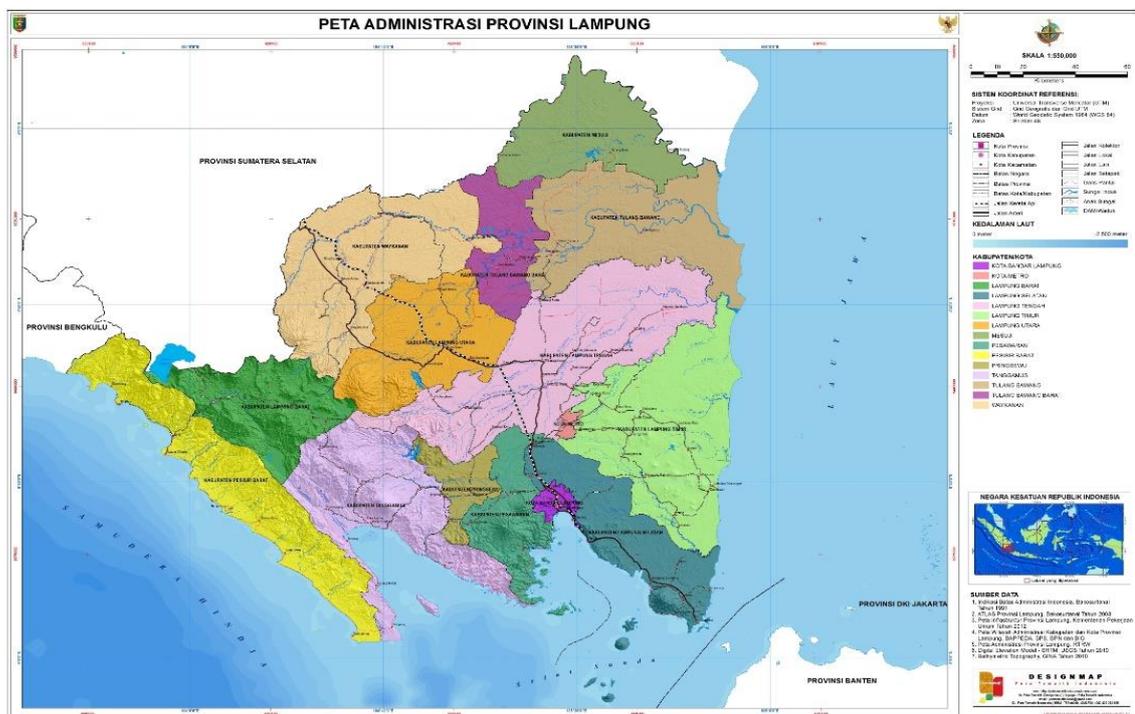
Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 ke Provinsi Lampung dilaksanakan pada tanggal 20-22 Juli 2020 dan bertempat di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Tengah.

F. GAMBARAN UMUM

Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatra, Indonesia, dengan ibu kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki dua kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro serta 13 kabupaten. Posisi Lampung secara geografis berada di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sumatra Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda.

Provinsi Lampung memiliki pelabuhan utama bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni, bandar udara utama yakni Radin Inten II terletak 28 km dari ibu kota provinsi, serta Stasiun Tanjungkarang di pusat ibukota. Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak di antara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini berada di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda.

Wilayah Provinsi Lampung memiliki beberapa pulau, diantaranya Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Kelagian, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang, Pulau Krakatau, Pulau Putus, Pulau Tabuan, Pulau Tampang dan Pulau Pisang. Geografi alam Provinsi Lampung, tengah-tengahnya merupakan dataran rendah. Kemudian sebelah barat dan selatannya khususnya di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit dimana sebagai sambungan dari jalur Bukit Barisan Pulau Sumatra. Sedangkan di dekat pantai sebelah timur dan di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara merupakan perairan laut.



Dengan luas $\pm 3.528.835$ ha, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beraneka ragam, prospektif, dan dapat diandalkan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, sampai kehutanan. Provinsi ini memiliki lahan sawah irigasi teknis seluas 103.245 ha, sawah, irigasi setengah teknis 24.164 ha, dan lahan sawah irigasi non teknis seluas 244.008 ha. Total saluran irigasi mencapai 371.417 km.

Sawah-sawah inilah yang pada 2006 menghasilkan 2.129.914 ton padi (gabah keringgiling/GKG), terdiri atas 1.959.426 ton padi sawah dan 170.488 ton padi ladang. Dibanding dua tahun terakhir, produktivitas padi yang dicapai

meningkat, Pada 2004, produksi padi mencapai 2.091.996 ton sementara pada 2005 mencapai 2.124.144 ton, Semua itu belum termasuk produksi ubi kayu rotan 2006 mencapai lebih dari 5.473.283 ton, dan produksi jagung 1.183.982 ton. Dengan demikian ketahanan pangan di provinsi ini cukup kuat.

Kawasan hutan mencapai 1.004.735 ha atau sekitar 30,43 % dari luas wilayah provinsi, terdiri atas hutan lindung 317.615 ha, hutan suaka alam dan hutan wisata/taman nasional 462.030 ha; hutan produksi terbatas 33.358 ha dan hutan produksi tetap 91.732 ha. Dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, produksi kehutanan kini lebih diarahkan kepada hasil hutan non kayu dan potensi ekowisatanya.

Hasil hutan pada 2006 berupa kayu bulat sebanyak 3.4121.171 m³, kayu gergajian 145.732,25 m³ dan kayu lapis 82.714.45 m³, Sedangkan produksi basil hutan non kayu berupa damar mata kucing sebanyak 5.454,17 ribu ton, damar batu 1.351,30 ton, arang 30.347 rotan manau 3.000 batang, dan rotan lilin 1.293,24 ton.

Provinsi Lampung memiliki wilayah pesisir yang luas dengan garis pantai lebih kurang 1.105 km dan 69 pulau-pulau kecil dengan beragam jenis habitat yang berbeda, termasuk lingkungan yang dibuat manusia, seperti tambak udang dan perkotaan. Kemudian untuk luas wilayah pesisirnya sekitar 440.010 ha dan luas perairan laut dalam batas 12 mil adalah 24.820,0 km² yang merupakan bagian wilayah Samudera Hindia (pantai barat Lampung), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka), dan Laut Jawa (pantai timur Lampung). Dengan wilayah pesisir dan laut yang cukup luas di Provinsi Lampung, maka sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. KUNJUNGAN KE PERSEMAIAN PERMANEN BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG (BPDASHL) WAY SEPUTIH WAY SEKAMPUNG

Dari hasil pertemuan dan kunjungan ke Persemaian Permanen Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Way Seputih Way Sekampung yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan

Katapang, Kabupaten Lampung Selatan didapatkan beberapa informasi, diantaranya:

1. Wilayah pengelolaan BPDASHL Way Seputih Way Sekampung meliputi areal seluas 3.802.996 hektar, dan terdiri dari 8 Satuan Wilayah Pengelolaan DAS, yaitu DAS Mesuji (723.715 hektar), DAS Tulang Bawang (979.819 hektar), DAS Seputih (751.527 hektar), DAS Sekampung (482.316 hektar), DAS Sekampung Ds (213.580 hektar), DAS Semangka (161.441 hektar), DAS Semangka Ds (334.261 hektar), dan DAS Abar Kambas (156.338 hektar).
2. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 256/Kpts-II/2000, kawasan hutan negara di Provinsi Lampung adalah seluas 1.004.735 hektar (28,45% dari ± 3.528.835 hektar luas Provinsi Lampung). Adapun kondisi kerusakan penutupan lahan saat ini adalah seluas 575.928 hektar atau 37,42% dari luas hutan di Provinsi Lampung.



3. Realisasi kegiatan pembuatan bibit tanaman RHL tahun 2019 adalah sebanyak 7.260.000 batang terdiri dari jenis tanaman produktif pala, alpukat, cengkeh, petai, durian, nangka, kemiri, duku, dan pinang, dengan target penanaman seluas 16.500 hektar.



4. Realisasi penyerapan tenaga kerja petani/masyarakat sekitar hutan untuk pelaksanaan program padat karya pada tahun 2019 adalah sebanyak 478.500 HOK dengan sasaran lokasi kegiatan di 3 (tiga) kabupaten, yaitu Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesawaran.

**Penyerapan Tenaga Kerja Petani/Masyarakat Sekitar Hutan
Program Padat Karya RHL Tahun 2019**

No	Wilayah KPH	Sasaran Lokasi	Volume	Penyerapan Tenaga Kerja Jumlah HOK
1	KPH Liwa	Kab. Lampung Barat	1.500 Ha	43.500
2	KPH Batu Tegi	Kab. Tanggamus	4.000 Ha	116.000
3	KPH Pematang Neba	Kab. Tanggamus	4.000 Ha	116.000
4	KPH Kota Agung Utara	Kab. Tanggamus	3.000 Ha	87.000
5	KPH Pesawaran	Kab. Pesawaran	4.000 Ha	116.000
Jumlah :			16.500 Ha	478.500



5. Target penyerapan tenaga kerja petani/masyarakat sekitar hutan untuk pelaksanaan program padat karya tahun 2020 adalah sebanyak 303.168 HOK dengan sasaran lokasi kegiatan di 3 (tiga) kabupaten yang sama.

**PENYERAPAN TENAGA KERJA
KEGIATAN TAHUN 2020**

No	Jenis Kegiatan	Volume	Jumlah (HOK)
1	Kebun Bibit Rakyat (KBR)	25 Unit	5.750
2	Pembuatan Dam Penahan (DPn)	10 Unit	1.250
3	Pembuatan Gully Plug (GP)	220 Unit	3.960
4	Kebun Bibit Desa (KBD)	5 Unit	2.410
5	Persemaian Permanen (PP)	2 Unit	13.278
6	Pembuatan Tanaman RHL (PO)	2.000 Ha	29.020
7	Pemeliharaan Tanaman RHL P1	16.500 Ha	247.500
	- KPH Liwa	1.500 Ha	22.500
	- KPH Batu Tegi	4.000 Ha	60.000
	- KPH Pematang Neba	4.000 Ha	60.000
	- KPH Kota Agung Utara	3.000 Ha	45.000
	- KPH Pesawaran	4.000 Ha	60.000
Jumlah Total :			303.168

6. BPDASHL Way Seputih Way Sekampung memiliki 2 (dua) Unit Persemaian Permanen yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan dan Tanggamus, dengan kapasitas produksi per tahun pada masing-masing Persemaian Permanen sebesar 2,5 juta batang dan 1 juta batang. Adapun Persemaian Permanen ini diharapkan dapat membantu dalam penyediaan

bibit tanaman hutan berkualitas untuk mendukung keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

DATA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI BIBIT PERSEMAIAN PERMANEN

PP LAMPUNG SELATAN

NO.	NAMA KABUPATEN	2016	2017	2018	2019	TOTAL	%
1	LAMPUNG SELATAN	704.466	960.157	1.213.842	1.044.978	3.923.443	39,63
2	BANDAR LAMPUNG	153.199	203.405	171.587	110.575	638.766	6,45
3	PESAWARAN	295.664	413.820	52.290	66.440	828.214	8,37
4	METRO	27.000	46.282	0	20.500	93.782	0,95
5	LAMPUNG BARAT	113.950	89.000	24.350	31.035	258.335	2,61
6	TANGGAMUS	51.900	140.045	76.400	27.200	295.545	2,99
7	MESUJI	105.141	2.000	0	15.000	122.141	1,23
8	WAY KANAN	277.765	82.000	126.000	89.900	575.665	5,81
9	LAMPUNG UTARA	53.900	4.560	0	1.000	59.460	0,60
10	TULANG BAWANG	37.100	0	24.500	84.690	146.290	1,48
11	LAMPUNG TENGAH	78.600	42.540	71.400	132.450	324.990	3,28
12	LAMPUNG TIMUR	451.203	401.991	703.431	734.682	2.291.307	23,14
13	PRINGSEWU	32.200	88.200	36.200	40.150	196.750	1,99
14	PESISIR BARAT	11.912	25.000	0	100.900	137.812	1,39
15	TULANG BAWANG BARAT	6.000	1.000	0	0	7.000	0,07
16	OKU	0	0	0	500	500	0,01
TOTAL :		2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	9.900.000	

7. Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan BPDASHL Way Seputih Way Sekampung melalui Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah sebagai berikut:

**UPAYA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
BPDASHL WAY SEPUTIH WAY SEKAMPUNG
MELALUI PROGRAM KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR)
Sebanyak 2.553 Unit (Tahun 2010-2019)**

NO	KAB./KOTA	JUMLAH UNIT KBR PER TAHUN (Unit)										TOTAL	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Bandar Lampung	2	5	3	2	1						2	15
2	Metro	1	2	3	4	1	1						12
3	Lampung Selatan	55	84	64	62	27	6			5			303
4	Lampung Timur	40	53	61	55	16	2						227
5	Lampung Tengah	47	51	54	60	12	9						233
6	Lampung Utara	40	51	45	60	22	8						226
7	Lampung Barat	42	67	93	56	36					4		298
8	Tulag Bawang	15	37	41	44	12							149
9	Tulang Bawang Barat	7	26	38	22								93
10	Pesawaran	10	40	51	34	24	19		2	2	6		188
11	Pringsewu	7	27	50	26	14	4	1			2		131
12	Tanggamus	55	76	67	75	52	6	10	6	3	8		358
13	Way Kanan	25	63	60	58	12							218
14	Mesuji	7	15	21	16	4							63
15	Pesisir Barat	-	-	-	26	7		6					39
TOTAL		353	597	651	600	240	55	17	8	10	22	2.553	

**UPAYA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
MELALUI PROGRAM KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR)
Sebanyak 97.685.000 Batang (Tahun 2010-2019)**

NO	SATKER	JUMLAH PEMBUATAN TANAMAN KBR PER TAHUN (Bat)										TOTAL	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Bandar Lampung	100.000	250.000	75.000	50.000	75.000	-	-	-	-	40.000		590.000
2	Metro	50.000	100.000	75.000	100.000	75.000	25.000	-	-	-	-		425.000
3	Lampung Selatan	2.750.000	4.200.000	1.600.000	1.550.000	1.600.000	150.000	-	-	100.000	-		11.950.000
4	Lampung Timur	2.000.000	2.650.000	1.525.000	1.375.000	1.525.000	50.000	-	-	-	-		9.125.000
5	Lampung Tengah	2.350.000	2.550.000	1.350.000	1.500.000	1.350.000	225.000	-	-	-	-		9.325.000
6	Lampung Utara	2.000.000	2.550.000	1.125.000	1.500.000	1.125.000	200.000	-	-	-	-		8.500.000
7	Lampung Barat	2.100.000	3.350.000	2.325.000	1.400.000	2.325.000	-	-	-	-	80.000		11.580.000
8	Tulag Bawang	750.000	1.850.000	1.025.000	1.100.000	1.025.000	-	-	-	-	-		5.750.000
9	Tulang Bawang Barat	350.000	1.300.000	950.000	550.000	950.000	-	-	-	-	-		4.100.000
10	Pesawaran	500.000	2.000.000	1.275.000	850.000	1.275.000	475.000	-	40.000	40.000	120.000		6.575.000
11	Pringsewu	350.000	1.350.000	1.250.000	650.000	1.250.000	100.000	20.000	-	-	40.000		5.010.000
12	Tanggamus	2.750.000	3.800.000	1.675.000	1.875.000	1.675.000	150.000	200.000	120.000	60.000	280.000		12.585.000
13	Way Kanan	1.250.000	3.150.000	1.500.000	1.450.000	1.500.000	-	-	-	-	-		8.850.000
14	Mesuji	350.000	750.000	525.000	400.000	525.000	-	-	-	-	-		2.550.000
15	Pesisir Barat				650.000	-	-	120.000	-	-	-		770.000
TOTAL		17.650.000	29.850.000	16.275.000	15.000.000	16.275.000	1.375.000	340.000	160.000	200.000	560.000		97.685.000

Rekomendasi:

- a. Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja BPDASHL Way Seputih Way Sekampung dalam melaksanakan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b. Komisi IV DPR RI mengapresiasi bentuk pembinaan yang telah dilaksanakan oleh BPDASHL Way Seputih Way Sekampung kepada petani/masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mengutamakan aspek pembelajaran teknis dan manajerial dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan, disamping mendorong dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
- c. Komisi IV DPR RI mendorong agar bentuk pembinaan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan yang telah dilaksanakan oleh BPDASHL Way Seputih Way Sekampung dapat dijadikan contoh pelaksanaan pembinaan mitra pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya, serta merekomendasikan dibukanya kesempatan studi banding di BPDASHL Way Seputih Way Sekampung bagi para petani/masyarakat sekitar hutan di wilayah lain.

B. PANEN RAYA JAGUNG DI DESA MARGA CATUR, KECAMATAN KALIANDA, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Tim Komisi IV DPR melakukan panen raya secara simbolis bersama-sama dengan Bupati Lampung Selatan. Adapun luas lahan jagung yang akan dipanen seluas 250 hektare yang dikelola oleh Kelompok Tani Maju. Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten penyuplai bahan pokok terutama beras dan jagung untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi wilayah Lampung bahkan di luar daerah.

Jagung merupakan salah satu komoditas yang ditargetkan dapat dipenuhi sendiri untuk pakan ternak dan konsumsi dan agar petani jagung semakin sejahtera. Adapun rata-rata produktivitas jagung lokal saat ini sekitar 6,4 ton per hektar. Kementerian Pertanian menargetkan produktivitas tersebut naik menjadi 8 hingga 9 ton per hektar. Saat ini Kementerian Pertanian memiliki banyak varietas yang potensinya 11 ton per hektare. Perlu diketahui, secara keseluruhan pada tahun 2019, luas panen jagung Provinsi Lampung 317.833 hektare (ha) dengan produksi 2,2 juta ton pipilan kering dengan provitas mencapai 6,84 ton per hektare.

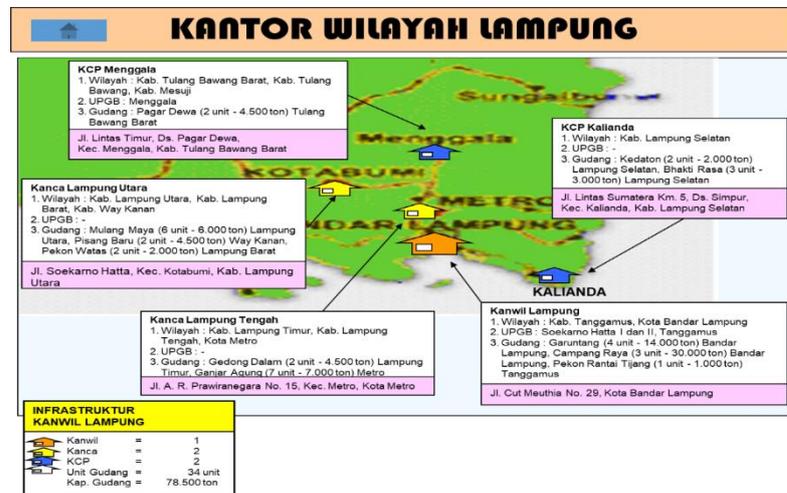
Lampung juga memiliki luas baku sawah 361.699 ha dan tahun 2019 panen padi mencapai 464.103 ha dengan produksi padi sebanyak 2,2 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 1,24 juta ton beras. Dari seluruh areal pertanian di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan memberikan kontribusi luas tanam jagung untuk periode April-Juni 2020 seluas 50.620 hektare. Sementara itu, untuk luas tanam padi pada periode yang sama yakni seluas 16.087 hektare.

Pada kegiatan ini, juga dibagikan bantuan kepada petani secara simbolis berupa pembangunan nurseri benih kelapa kopyor, bantuan mesin potong rumput, bantuan *solar portable*, bantuan bibit kelapa genjah, bantuan bibit cengkeh, bantuan bibit kopi, bantuan benih padi, bantuan *rice milling* sebanyak 2 unit dan bantuan KUR kostraling/penggilingan padi.

Komisi IV DPR RI mendukung program Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pangan dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pada pertemuan ini Tim Komisi IV DPR RI menerima keluhan dari petani mengenai harga jual jagung hasil panen yang rendah, tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Diinformasikan bahwa tahun 2020 harga jagung untuk saat ini Rp1.800 dalam keadaan kadar air 35%, yang jika dikeringkan dan dijual digudang hanya Rp3.150. Terkait harga, terdapat permintaan agar Pemerintah dapat memberikan subsidi harga jagung kepada petani.

Selain itu, Tim Komisi IV DPR RI menerima aspirasi terkait bantuan benih jagung agar diberikan yang berkualitas tinggi, serta tahan dari serangan hama dan penyakit. Benih jagung yang berkualitas sangat berpengaruh terhadap jagung yang dihasilkan serta biaya/modal yang dikeluarkan. Terkait dengan hal tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk menyalurkan bantuan bibit yang bagus, namun juga bantuan mesin pengering jagung sehingga petani menjual jagung dengan harga yang sangat menguntungkan.

C. KUNJUNGAN DAN PERTEMUAN DI GUDANG BULOG KOTA BANDAR LAMPUNG



Adapun beberapa poin yang diperoleh dalam pertemuan ini antara lain:

Pencapaian Kinerja Operasional Perum Bulog Juli 2020

REALISASI PENGADAAN DALAM NEGERI
KANTOR WILAYAH SELURUH INDONESIA TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020

No	Kanwil	Target 2019 (Str Beras)		Total realisasi		%	Target 2020 (Str Beras)		Total realisasi *		%
		Jan-Des	Jan-Jul	str gabah	str beras		1 Tahun	Jan-Des	Jan-Jul	str gabah	
1	DKI JAKARTA & BANTEN	39.794	36.883	33.914	16.957	42,61%	57.800	18.053	103.168	51.584	89,25%
2	JABAR	202.429	187.737	450.722	225.361	111,33%	213.400	161.584	254.951	127.475	59,74%
3	JATENG	290.398	270.547	248.397	124.198	42,77%	173.800	125.268	159.085	79.543	45,77%
4	DI. YOGYA	89.376	83.334	65.270	32.635	36,51%	53.000	33.536	77.369	38.684	72,99%
5	JATIM	351.215	324.831	478.172	239.086	68,07%	208.900	159.473	293.402	146.701	70,23%
6	ACEH	38.828	35.932	15.124	7.562	19,48%	17.500	12.617	25.121	12.560	71,77%
7	SUMUT	20.433	19.647	42.960	21.480	105,12%	20.400	9.294	62.335	31.167	152,78%
8	RIAU & KEPRI	4.416	4.044	13.617	6.808	154,18%	19.500	5.233	6.476	3.238	16,60%
9	SUMBAR	10.245	9.495	9.538	4.769	46,55%	15.700	4.375	4.631	2.315	14,75%
10	JAMBI	10.245	9.495	10.909	5.454	53,24%	9.200	3.707	26.410	13.205	143,53%
11	SUMSEL & BABEL	70.570	65.578	103.380	51.690	73,25%	84.500	40.736	99.659	49.830	58,97%
12	BENGKULU	8.746	8.105	8.931	4.466	51,06%	3.600	1.844	17.027	8.513	236,48%
13	LAMPUNG	102.079	94.619	102.691	51.345	50,30%	85.000	50.376	61.191	30.596	35,99%
14	KALBAR	1.905	1.765	8.856	4.428	232,42%	16.300	4.322	12.002	6.001	36,82%
15	KALTIM & KALTARA	5.000	4.634	9.514	4.757	95,14%	5.800	2.446	10.881	5.440	93,80%
16	KALSEL	28.245	26.180	23.278	11.639	41,21%	18.100	12.959	12.490	6.245	34,50%
17	KALTENG	5.222	4.839	7.899	3.949	75,63%	4.600	2.461	7.242	3.621	78,72%
18	SULUT & GORONTALO	4.252	3.939	4.664	2.332	54,85%	5.700	1.665	5.169	2.584	45,34%
19	SULTENG	32.673	30.284	39.324	19.662	60,18%	20.000	12.365	22.594	11.297	56,48%
20	SULTRA	12.245	11.349	34.847	17.424	142,29%	24.500	12.547	34.643	17.322	70,70%
21	SULSELBAR	290.920	269.466	429.693	214.846	73,85%	225.200	135.744	210.938	105.469	46,83%
22	BALI	9.845	9.125	7.444	3.722	37,80%	6.000	1.566	7.355	3.678	61,29%
23	N.T.B	141.654	131.216	150.803	75.401	53,23%	70.200	43.982	106.329	53.165	75,73%
24	N.T.T	6.246	5.788	16.858	8.429	134,96%	7.400	2.965	12.751	6.376	86,16%
25	MALUKU & MALUT	1.746	1.617	4.433	2.217	126,98%	3.400	1.509	2.470	1.235	36,32%
26	PAPUA & PABAR	48.747	45.182	81.291	40.645	83,38%	30.500	24.785	29.900	14.950	49,02%
	JUMLAH	1.827.475	1.695.631	2.402.529	1.201.264	65,73%	1.400.000	885.410	1.665.588	832.794	59,49%

Pencapaian Kinerja Operasional Perum Bulog Juli 2020 (Kantor Wilayah Lampung)

REALISASI PENGADAAN KANTOR WILAYAH LAMPUNG

(dalam ton)

NO	KANTOR WILAYAH/KANTOR CABANG	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	% REAL vs TARGET	TARGET	REALISASI *	% REAL vs TARGET
1	LAMPUNG	30.500	18.931	62,07%	35.979	13.360	37,13%
2	KALIANDA	14.000	3.189	22,78%	5.275	3.883	73,61%
3	MENGALA	11.579	3.283	28,35%	4.330	1.662	38,38%
4	LAMPUNG TENGAH	33.000	22.297	67,57%	34.413	5.804	16,87%
5	LAMPUNG UTARA	13.000	3.646	28,05%	5.004	5.887	117,65%
	TOTAL	102.079	51.345	50,30%	85.000	30.596	35,99%

*) per 16 Juli 2020

Penyaluran BPNT Tahun 2020 Kantor Wilayah Lampung

NO	KANWIL	KOMODITI	PENJUALAN BPNT 01 JAN SD 16 JULI 2020				TOTAL PENJUALAN BPNT	
			Melalui RPK, E-Warong dan		Melalui Distributor		Kg	Rp
			Kg	Rp	Kg	Rp		
1	LAMPUNG	BERAS	-	-	6,824,510	58,747,413,000	6,824,510	58,747,413,000
		TELLUR	5,360	128,640,000	-	-	5,360	128,640,000

Sumber data : aplikasi penjualan langsung dan SIL

Keterangan :
Kanwil : Kantor Wilayah

Posisi Persediaan Beras CBP Wilayah Lampung

Satuan: ton

NO	UNIT KERJA	BERAS CBP	BERAS KOMERSIAL	TOTAL
1	Kanwil Lampung	7.893	7	7.900
2	KCP Kalianda	3.432	1	3.433
3	KCP Menggala	1.946	6	1.952
4	Kanca Lampung Tengah	11.808	-	11.808
5	Kanca Lampung Utara	3.359	504	3.863
	JUMLAH	28.437	518	28.955

*) per 16 Juli 2020 (closing)

D. BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG

1. Badan KIPM merupakan institusi yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan terkait sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan bagi kegiatan baik impor, ekspor, maupun antararea di dalam wilayah Republik Indonesia, sehingga ikan produk/hasil perikanan tersebut sehat, aman dan layak dikonsumsi, serta tidak membahayakan lingkungan. Trend semacam ini dalam istilah Internasional disebut dengan "one health".
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsi perkarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan yang tersebar di pelabuhan laut, bandara dan 18 pos lintas batas, serta pelabuhan penyeberangan yang mencakup 234 wilayah kerja pelayanan dan pengawasannya berada di bawah 47 UPT KIPM (salah satunya Balai KIPM Lampung), BKIPM perlu membangun sinergi dengan instansi terkait terutama mitra kami di Komisi IV DPR RI.
3. Balai KIPM Lampung berkesempatan menerima Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan IV tahun Sidang 2019-2020, sekaligus melakukan penyerahan "Ikan Sehat Bermutu untuk menanggulangi COVID-19" secara simbolis. Diharapkan dengan adanya kunjungan kerja

ini, Komisi IV DPR RI dapat secara langsung mengetahui dan meninjau sarana dan prasarana serta permasalahan yang dihadapi BKIPM Lampung sekaligus menilai kinerja BKIPM dan memberikan dukungan serta masukan guna peningkatan kinerja BKIPM ke depannya.

4. *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai sebuah pandemi. Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Diperlukan kebersamaan dan kekompakan untuk perang melawan COVID-19. Beberapa waktu lalu KKP melalui BKIPM telah menyelenggarakan kegiatan “Bulan Mutu Karantina Ikan”, dalam kegiatan ini BKIPM turut berperan aktif melawan pandemi COVID-19 melalui penyediaan pangan bergizi, yaitu ikan sehat dan bermutu kepada masyarakat terdampak dengan menyerap produk hasil perikanan dan menyalurkan kepada masyarakat terdampak. Kegiatan ini juga berlangsung di 47 UPT BKIPM-KKP di seluruh Indonesia. Dengan mengonsumsi protein dari ikan sehat bermutu, diharapkan masyarakat Indonesia semakin sehat dan mempunyai daya tahan tubuh yang prima.
6. Jumlah bantuan ikan sehat bermutu seluruh Indonesia tahun 2020 sebanyak 76.675 paket dan 9,664 paket CSR masing2 paket berisi 2 - 3 kg ikan beku/segar dan ikan kaleng serta olahan ikan. Produk tersebut dibeli dari nelayan/petani ikan di lokasi UPT BKIPM dan dibagikan kepada masyarakat praktisi perikanan yang terpapar seperti nelayan, pembudi daya ikan, *supplier*, pengolah dan pemasar hasil perikan dan olahan ikan, serta masyarakat kecil sekitar kantor UPT KIPM, yatim piatu, santri dan pengurus pondok pesantren, tenaga medis yang menangani pasien COVID-19, dan masyarakat umum lainnya yang terdampak.
7. Khusus bantuan dari Balai KIPM Lampung tertanggal 5-15 Mei sebanyak 2400 paket untuk 4 kabupaten/kota, dengan rincian Bandar Lampung (800 paket), Pesawaran (750 paket), Metro (600 paket), Lampung Selatan (250 paket). Selanjutnya pada hari ini tanggal 21 Juli 2020, pemberian bantuan kepada Kabupaten Pesawaran (750 paket), Metro (250 paket), dan

Pringsewu (250 paket) berupa ikan nila segar serta bantuan kepada Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Lampung 500 paket, sehingga total bantuan 9,9 ton ikan sehat bermutu untuk menanggulangi COVID-19 kepada masyarakat terdampak.

8. Dengan adanya kebijakan pemerintah baru yaitu “*new normal*” dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO, BKIPM turut mendukung kebijakan pemerintah dengan penyesuaian pelayanan perkarantinaan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan memperhatikan zonasi penyebaran COVID-19. Beberapa bentuk penyesuaiannya adalah inovasi pelayanan melalui daring baik untuk sertifikasi maupun surveilans, dan pelayanan secara tatap muka dengan menerapkan *physical distancing*, penyediaan tempat cuci tangan, pengukuran suhu tubuh, wajib menggunakan masker, disinfeksi ruang pelayanan, dan sebagainya. BKIPM sebagai Otoritas Kompeten Sistem Perkarantinaan Ikan, Jaminan Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan berkomitmen dalam hal penjaminan mutu dan pengawasan keamanan hasil perikanan agar dapat dilakukan secara terkontrol mulai dari hulu sampai hilir, sehingga seluruh produk perikanan yang akan diekspor telah memenuhi standar yang ditetapkan.
9. BKIPM juga telah menyampaikan himbauan kepada rantai pasok hulu-hilir, supplier dan UPI untuk melakukan proses produksi dan karyawan yang berkerja harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO.
10. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus profesional dan adaptif dengan protokol pelayanan tatanan normal baru; ASN harus sehat, pengguna jasa yang dilayani juga harus sehat dan produk hasil layanan harus memenuhi standar mutu yang aman untuk dikonsumsi.
11. Seperti diketahui potensi dari sektor kelautan dan perikanan di Lampung ini sangat luar biasa mulai perikanan darat, payau dan laut dari ikan, tambak udang, kolam ikan, rumput laut, dan lain sebagainya. Potensi ikan ini sangat bagus, baik dari jumlahnya dan kualitasnya. Tentunya potensi itu harus dimaksimalkan dengan sebaik mungkin untuk peningkatan ekspor produk perikanan.

12. Sebagai informasi, produk perikanan yang diekspor dari Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan kabar yang menggembirakan, dimana pada masa pandemi ini, beberapa sektor usaha justru mengalami penurunan produktivitas. Tentu saja, hal ini perlu disertai dengan penyesuaian sistem kerja agar sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi.
13. BKIPM berkomitmen menjaga jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan supaya produk-produk perikanan Indonesia tetap dapat dilalulintaskan dan diterima di negara-negara tujuan ekspor.

E. KUNJUNGAN DAN PERTEMUAN DI GREAT GIANT FOODS (GGF), TERBANGGI BESAR, LAMPUNG TENGAH

Pada kunjungan ini, dilakukan pertemuan yang dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk melihat proses produksi di pabrik, dan instalasi proses pupuk cair LOB (*Liquid Organic Biovertilizer*). Pada saat pertemuan disampaikan bahwa GGF merupakan perusahaan hortikultura yang mempekerjakan sekitar 20 – 25 ribu tenaga kerja, dan selama tahun 2019 GGF telah berhasil mengekspor buah dalam kaleng sekitar 13.500 kontainer dan buah segar sebanyak 4.000 kontainer ke mancanegara. Selain itu, pada tahun 2020 GGF menjadi suplier nanas terintegrasi terbesar di dunia.

Untuk mengantisipasi permintaan buah yang terus meningkat, GGF mengembangkan program dengan pola *Creating Shared Value* (CSV) yang diterapkan pertama kali di Tanggamus Lampung. Melalui model ini, petani sudah bisa ekspor pisang mas ke Cina, dan harga jual yang diterima oleh petani sudah ditetapkan berdasarkan kontrak per tahun sesuai kesepakatan. Sehingga meskipun harga jatuh pada saat panen, hal tersebut tidak berdampak pada petani mitra.

Model CSV akan terus dikembangkan diberbagai daerah setelah Tanggamus Lampung, berlanjut ke Jembrana Bali, Bener Meriah Aceh, Bondowoso Jawa Timur, dan rencananya juga akan dikembangkan di beberapa wilayah lain di wilayah timur Indonesia untuk memudahkan ekspor ke Jepang dan China. Untuk mendukung program CSV, diterapkan aplikasi sistem *e-grower* dan program ini telah dicanangkan oleh Menteri Perindustrian pada tahun 2019 lalu. Melalui program CSV, kebun GGF di Lampung akan

fokus untuk pemenuhan pasar ekspor, dan kebutuhan pasar domestik akan dipenuhi melalui mitra CSV.

Menanggapi penjelasan dari pihak GGF, Komisi IV DPR RI menilai perusahaan hortikultura *PT Great Giant Pineapple Company* (GGPC), Lampung, bisa menjadi proyek percontohan atau *role model* bagi Kementerian Pertanian untuk pengembangan tanaman hortikultura, salah satunya komoditas nanas. Lebih lanjut lagi, bila perlu para petani didatangkan ke GGPC untuk mencontoh dan mempelajari teknik pengembangan tanaman hortikultura.

Komisi IV DPR RI juga mendapat masukan dari GGPC mengenai pengenaan pajak yang sangat tinggi terhadap ekspor sejumlah komoditas hortikultura asal Lampung. Sebagai gambaran, komoditas nanas dan pisang asal Indonesia dikenakan bea masuk hingga 56 persen jika akan masuk pasar Eropa (antara lain negara Uni Eropa, dan Turki) maupun Asia (antara lain Korea Selatan dan Jepang), dimana untuk produk yang sama asal Philipina atau Malaysia dikenakan bea masuk yang lebih rendah atau bahkan nol persen. Akibatnya, produk pertanian asal Indonesia menjadi tidak kompetitif.

Selain itu, GGF juga mengharapkan adanya dukungan dari Pemerintah terkait kepastian hukum, perizinan usaha; serta dukungan diplomasi perdagangan agar produk Indonesia dapat masuk di pasar dunia dengan Bea Masuk yang rendah dan harga jual yang kompetitif. Menanggapi hal tersebut, Komisi IV DPR RI akan mengundang berbagai pihak, termasuk dari pelaku usaha hortikultura guna mendapatkan masukan yang kemudian dibahas bersama-sama dengan Pemerintah dalam rangka mencari solusi dan merumuskan kebijakan dalam mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekspor, khususnya ekspor hasil produk pertanian.

III. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja BPDASHL Way Seputih Way Sekampung dalam melaksanakan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
2. Komisi IV DPR RI mengapresiasi bentuk pembinaan yang telah dilaksanakan oleh BPDASHL Way Seputih Way Sekampung kepada petani/masyarakat di sekitar kawasan hutan yang mengutamakan aspek pembelajaran teknis dan

manajerial dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan, disamping mendorong dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

3. Komisi IV DPR RI mendorong agar bentuk pembinaan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan yang telah dilaksanakan oleh BPDASHL Way Seputih Way Sekampung dapat dijadikan contoh pelaksanaan pembinaan mitra pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya, serta merekomendasikan dibukanya kesempatan studi banding di BPDASHL Way Seputih Way Sekampung bagi para petani/masyarakat sekitar hutan di wilayah lain.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam memberikan bantuan benih jagung menggunakan benih jagung yang berkualitas yang dapat menghasilkan jagung yang bermutu dan produktivitasnya tinggi.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk meningkatkan bantuan pemerintah untuk alat dan mesin pascapanen (seperti alat pengering) agar produk pertanian yang dijual dengan harga lebih tinggi serta bantuan alat pengangkut motor roda 3 untuk membantu petani dalam melakukan usaha taninya.
6. Komisi IV DPR RI akan mengundang asosiasi dan perusahaan jagung untuk mendapatkan masukan berkaitan dengan penetapan harga jagung serta dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya jagung.
7. Komisi IV DPR RI akan bersinergi dengan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam menyerap aspirasi dan menerima keluhan dari petani guna mencari jalan keluar serta merumuskan kebijakan terkait peningkatan produksi pangan nasional.
8. Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog c.q. Perum Bulog Kadirre Lampung agar tetap menjaga kualitas beras yang dijual/dialurkan kepada masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI memberikan dukungan kepada Perum Bulog dalam upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan beras.
9. Komisi IV DPR RI meminta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Lampung untuk menjaga mutu komoditas sektor kelautan dan perikanan dengan melakukan pengawasan secara rutin ke sejumlah tempat pelaku usaha perikanan.

10. Komisi IV DPR RI meminta BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan di Lampung untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha budi daya udang, dalam rangka meningkatkan dan menjamin kualitas/mutu hasil usaha sesuai permintaan pasar, untuk meningkatkan nilai ekspor udang Indonesia.
11. Komisi IV DPR RI mengapresiasi kegiatan usaha buah hortikultura GGF yang telah menghasilkan buah untuk ekspor dan mempekerjakan banyak karyawan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendukung pelaksanaan kegiatan program CSV yang dilakukan GGF dalam rangka menjaga stabilitas harga dan meningkatkan penghasilan petani hortikultura.
12. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah bersama GGF untuk melakukan pengembangan kemitraan pola CSV di daerah sentra produksi hortikultura potensial lainnya, seperti NTB, NTT, dan Sulawesi.
13. Komisi IV DPR RI akan mengundang pelaku usaha hortikultura guna mendapatkan masukan yang kemudian dibahas bersama-sama dengan Pemerintah dalam rangka mencari solusi dan merumuskan kebijakan dalam mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekspor, khususnya ekspor hasil produk pertanian.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 ke Provinsi Lampung. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 23 Juli 2020

Ketua Tim,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151

LAMPIRAN DOKUMENTASI



LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29502/t/Pembenihan+Tanaman+di+Persemaian+Permanen+Lampung+Selatan+sudah+Baik>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29500/t/Komisi+IV+Dukung+Kementan+Tingkatkan+Produksi+Pertanian+di+Lampung>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29513/t/BKIPM+Lampung+Diminta+Jaga+Mutu+Komoditas+Budidaya+Udang>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29523/t/Pajak+Ekspor+Hortikultura+Tinggi%2C+Komisi+IV+Akan+Bersurat+Kepada+Kemenkeu>

<https://www.lampung77.com/reses-di-lampung-komisi-iv-dpr-tinjau-penyemaian-bibit-hingga-panen-jagung/>

<https://www.gesuri.id/pemerintahan/reses-komisi-iv-dpr-kunjungi-lampung-b1YPwZuFj>

<https://www.lampungselatankab.go.id/web/2020/07/20/kunker-ketua-komisi-iv-dpr-ri-puji-keberhasilan-pembibitan-bpp-lamsel/>

<https://lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-berharap-dukungan-komisi-iv-dpr-ri-untuk-kembangkan-potensi-kelautan-dan-perikanan-lampung>

<https://mediaindonesia.com/read/detail/330016-komisi-iv-dpr-dukung-kementan-genjot-produksi-pertanianlampung>

<https://www.radarlamsel.com/kunker-komisi-iv-dpr-ri-dan-kementan-ri-dapat-keluhan-harga-jagung-anjlok/>

<https://www.redaksi24.com/komisi-iv-dpr-dan-kementan-panen-roya-jagung-di-lampung/>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29500/t/Komisi+IV+Dukung+Kementan+Tingkatkan+Produksi+Pertanian+di+Lampung>

<https://headlinelampung.com/2020/07/21/komisi-iv-dpr-ri-lakukan-kunker-ke-perusahaan-ggf/>

<https://medialampung.co.id/pemprov-harapkan-dukungan-komisi-iv-dpr-ri-untuk-pengembangan-potensi-kelautan-perikanan/>

<https://bbpbl.djpb.kkp.go.id/kepala-bbpbl-lampung-mewakili-djpb-hadiri-kunker-komisi-iv-dprri-ke-prov-lampung/>

https://www.youtube.com/watch?v=GFDcGg_WBHQ

<https://rakyatlampung.id/komisi-iv-dpr-ri-optimis-program-csv-ggf-terus-berkembang/>